



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172.1/ 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI  
BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;**
  - b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 1 April 2024;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2023;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
14. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023.

**KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

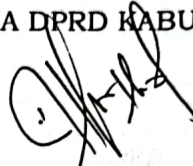
- a. Panitia Khusus I membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2023 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah.
- b. Panitia Khusus II membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2023 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah.

**KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 1 April 2024

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



MAULANA YUSUP

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Batang  
Nomor : 172.1/ 5 Tahun 2024  
Tanggal : 1 April 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. Fatkhurohman, S.H.	Ketua	Ketua Komisi D	D	PKB
2	Slamet Supriyadi, SE	Wakil Ketua	Wakil Ketua Komisi D	D	F.PDIP
3	I'anutul Fikria, S.Pd	Anggota	Anggota	D	PKB
4	Nurul Mubin, S. Kom. I	Anggota	Anggota	A	PKB
5	Hj. Junaenah	Anggota	Anggota	B	F.PDIP
6	M. Zaenudin, SH	Anggota	Anggota	A	F.PDIP
7	Bebeng Ahyani, S.Pd.I	Anggota	Anggota	A	GOLKAR
8	Dadang Suhargo	Anggota	Anggota	D	GOLKAR
9	Danang Aji Saputra, S.T, MH	Anggota	Ketua Komisi A	A	GOLKAR
10	Khabib Khozy, S.H.I	Anggota	Anggota	A	PPP
11	Wintoro, SH	Anggota	Anggota	D	PPP
12	Hj. Rustiasih	Anggota	Anggota	A	GERINDRA
13	H. Benny Abidin, SH, MH	Anggota	Anggota	B	GERINDRA
14	Edi Siswanto, S.Sos	Anggota	Anggota	B	DEMOKRAT PAN
15	Karmubit, SH	Anggota	Anggota	A	HANURA NASDEM

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,

  
MAULANA YUSUP

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Batang  
Nomor : 172.1/ 5 Tahun 2024  
Tanggal : 1 April 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	Kukuh Fajar Rhomadhon, SE	Ketua	Anggota	C	PKB
2	H. Muafie	Wakil Ketua	Anggota	C	HANURA NASDEM
3	Su'udi, S.Ag	Anggota	Ketua Komisi B	B	PKB
4	Mufit Miftachudin, S.Pd.I	Anggota	Anggota	A	PKB
5	H. Tofani Dwi Arieyanto, SH	Anggota	Ketua Komisi C	C	F.PDIP
6	Drs. Riharso	Anggota	Anggota	A	F.PDIP
7	H. Junaedi	Anggota	Anggota	C	F.PDIP
8	Bambang Sasongko, SH	Anggota	Anggota	B	GOLKAR
9	H. Nur Untung Slamet, SE	Anggota	Wakil Ketua DPRD	C	GOLKAR
10	Subakir	Anggota	Anggota	C	GOLKAR
11	Nasikhin, SH	Anggota	Wakil Ketua Komisi B	B	PPP
12	Makhrus	Anggota	Anggota	C	PPP
13	Arif Al Akbar, S.E.	Anggota	Anggota	C	GERINDRA
14	Hj. Nur Cahyaningsih, SH	Anggota	Anggota	D	GERINDRA
15	H. Juki JS	Anggota	Anggota	A	DEMOKRAT PAN

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,



MAULANA YUSUP